

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional diartikan sebagai suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Pembangunan nasional membutuhkan serangkaian investasi yang tidak terlepas dari penyediaan dana yang cukup besar sebagai pembiayaan pembangunan. Biaya-biaya tersebut didapat dari penerimaan-penerimaan setiap tahun yang direalisasikan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerimaan-penerimaan dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara berdasarkan kemampuan masing-masing yang dipaksakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembayar pajak tidak menerima imbalan atau kontribusi yang dapat secara langsung dihubungkan dengan pajak yang dibayarnya. (Waluyo, 2000)

Berdasarkan UU No.25 tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” pemerintah mengimplementasikan pembagian dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah pada tahun anggaran 2001. Dalam rangka mengakomodasi peningkatan perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk salah satu anggaran pembangunan yang didaerahkan. Hasil penerimaan daerah berupa PBB akan ditransfer oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat yang selanjutnya akan didistribusikan kembali ke daerah.

Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangannya pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. 90% yang merupakan bagian daerah dirinci sebagai berikut: (Suandy, 2002)

1. 16,2 % untuk daerah propinsi yang bersangkutan.
2. 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. 9% untuk biaya pemungutan

Bagian Pemerintah pusat 10% selanjutnya dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan. Alokasi pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota.
2. 35% dibagikan sebagai insentif kepada Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam hal ini PBB diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, karena pajak merupakan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara selain minyak bumi

dan gas yang semakin menurun perannya bagi penerimaan negara. Sejalan dengan itu pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara melalui penyempurnaan atas pelaksanaan sistem atau kewajiban perpajakan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, yuridis, ekonomi dan finansial, dengan harapan dapat memperlancar pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maka dari itu, dengan adanya penyempurnaan sistem atau undang-undang perpajakan diharapkan dapat memperkecil terjadinya kebocoran, memperjelas fungsi serta pembagian tugas sesuai dengan bagian dan kepentingannya dalam hal pemungutan pajak. (Priantoro,2000)

Kantor Pelayanan PBB Sleman merupakan instansi pemerintah yang tugasnya adalah menghimpun penerimaan negara khusus PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dari masyarakat Sleman. Selain itu Kantor Pelayanan PBB juga mengadministrasi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan laporan hasil penerimaan PBB yang terdapat di Kantor Pelayanan PBB (KPPBB) Sleman dari tahun anggaran 2004-2006, bisa dikatakan bahwa kinerja pemungutan PBB tiap tahunnya sudah cukup efektif. Hal ini bisa dilihat dari realisasi hasil penerimaan PBB yang selalu mencapai target yang telah ditetapkan, walaupun presentase realisasi penerimaan semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan rotasi tanah yang menimbulkan kesulitan bagi pihak fiskus dalam pemungutan pajak karena tidak terdapat kejelasan mengenai subjek pajak serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB.

Melihat adanya faktor-faktor diatas, tidak cukup apabila menilai kinerja Kantor Pelayanan PBB hanya berdasarkan pencapaian target saja. Untuk itu kita perlu melihat faktor-faktor lain diluar itu. Salah satu faktor yang juga sangat mempengaruhi hasil pemungutan PBB selain dari wajib pajak yaitu sistem pengendalian internal yang dilaksanakan Kantor Pelayanan PBB Sleman itu sendiri. Untuk mendukung tugasnya, Kantor Pelayanan PBB memerlukan sistem pengendalian internal yang baik agar tugasnya dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan visi dan misinya.

Pemungutan PBB dari masyarakat harus bisa dilaksanakan secara optimal tanpa mengabaikan peraturan perpajakan dan kebijakan yang berlaku Untuk mengoptimalkan pemungutan PBB diperlukan pengendalian internal yang baik dalam KPPBB itu sendiri. Sistem pengendalian internal yang baik akan menjamin pelaksanaan pemungutan pajak. Unsur-unsur sistem pengendalian internal yaitu sebagai berikut (Mulyadi, 1993):

1. struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Dengan adanya sistem pengendalian internal yang terlaksana dengan baik merupakan suatu tindakan preventif dalam tubuh organisasi untuk mengefektifkan organisasi sehingga terdapat penugasan fungsi dan wewenang dalam menjalankan tugas operasionalnya.

Oleh karena hal-hal diatas masyarakat perlu mengkaji bagaimana kinerja dari KPPBB Sleman itu sendiri, karena pada dasarnya hasil dari kinerja pemungutan PBB oleh KPPBB adalah demi kemajuan masyarakat kita juga. Oleh karenanya kita perlu mengetahui apakah sistem pengendalian internal pada KPPBB Sleman yang dilakukan sampai saat ini sudah berjalan dengan baik dan efektif atau belum

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap sistem pengendalian internal atas pemungutan PBB, yang ditulis dalam judul: **“Evaluasi Sistem Pengendalian Internal atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sleman”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal penerimaan PBB di Kantor Pelayanan PBB Sleman sudah baik?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal penerimaan PBB di Kantor Pelayanan PBB Sleman telah dilaksanakan dengan efektif?

1.3.Batasan Masalah

Untuk menghindari agar permasalahan tidak meluas, maka penulis memberikan batasan penelitian pada:

1. Kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penelitian ini menggunakan populasi dan unit sampel periode 2006-2007.
3. Penelitian dibatasi hanya seputar prosedur pemungutan PBB dengan jenis pelayanan pendaftaran obyek pajak baru. Masalah lain di luar ini tidak dibahas, misalnya pengajuan permohonan keberatan dan pengurangan, mutasi obyek pajak dan masalah-masalah lain seputar pembayaran PBB.
4. Agar pembahasan tidak terlalu luas dan mencapai sasaran yang diinginkan maka sistem pengendalian internal atas pemungutan PBB yang diteliti dibatasi pada pengendalian administratif.
5. Kriteria yang baik dipenuhi apabila hasil penilaian terhadap setiap unsur sistem pengendalian internal menunjukkan bahwa:
 - a. Struktur organisasi memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas
 - b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
 - d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya
6. Apabila sistem pengendalian internal yang ada di Kantor Pelayanan PBB Sleman sudah baik, maka dilakukan pengujian pengendalian pelaksanaan sistem pengendalian internal atas pemungutan PBB. Sistem pengendalian internal dikatakan efektif apabila setelah dilakukan pengujian pengendalian dengan attribute sampling, hasil yang diperoleh AUPL kurang dari atau sama dengan DUPL. Jika hasil yang diperoleh AUPL melebihi DUPL maka sistem pengendalian internal dikatakan tidak efektif (Mulyadi, 2001).

1.4. Tujuan Penelitian

Mengevaluasi sistem pengendalian internal atas pemungutan PBB yang telah dilaksanakan KPPBB Sleman, apakah sudah cukup baik dan sudah efektif atau belum. Hal ini dimaksudkan untuk memberi masukan bagi KPPBB Sleman apabila ditemukan adanya kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian yang diterapkan..

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan yang akan diambil sehingga dapat

menerapkan pengendalian internal atas pemungutan PBB dengan lebih baik.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk mengembangkan diri dalam evaluasi sistem pengendalian internal, khususnya atas pemungutan PBB.

3. Bagi pihak lain

Digunakan sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk memperluas wawasan pengetahuan bagi pembaca, serta dapat menambah laporan hasil penelitian baik pada lembaga pendidikan maupun bagi perusahaan atau organisasi lainnya.

1.6. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman yang beralamat di Jl. Janti Plumbon Banguntapan, Sleman, Yogyakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengobservasi langsung obyek penelitian dan pengumpulan datanya dengan melihat dokumentasi mengenai data-data PBB yang ada pada Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Sleman.

3. Metode pengumpulan data

a) Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya (wawancara) kepada pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan topik penelitian.

b) Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan pemungutan PBB.

c) Kuesioner

Untuk mempelajari sistem pengendalian internal obyek yang diperiksa, digunakan daftar pertanyaan yang diisi oleh pihak yang berwenang.

d) Inspeksi

Inspeksi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang terkait.

4. Jenis Data

a) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait

b) Data Sekunder

Yaitu mempelajari dan mengolah data yang diperoleh dari instansi yang menjadi objek penelitian..

5. Metode analisis data

➤ Analisis Kualitatif

Analisis ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang pertama yaitu mengevaluasi apakah sistem pengendalian internal penerimaan PBB di Kantor Pelayanan PBB Sleman sudah baik atau belum.

Analisis ini dilakukan dengan cara mengevaluasi setiap unsur sistem pengendalian internal penerimaan PBB di Kantor Pelayanan PBB yang meliputi (Mulyadi,1993:

- a. Struktur organisasi memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Evaluasi sistem pengendalian internal diperoleh melalui wawancara, observasi dan kuesioner.

➤ **Analisis Kuantitatif**

Analisis ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang kedua yaitu mengevaluasi apakah pelaksanaan sistem pengendalian internal atas pemungutan PBB yang ada telah dilaksanakan dengan efektif.

Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal sudah memadai, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dilakukan dengan metode statistik yaitu attribute sampling untuk mendapatkan keyakinan bahwa sistem pengendalian benar-benar telah dilaksanakan secara efektif. Metode sampling yang digunakan adalah stop-or-go sampling attribute sampling, karena pada pengujian 50 (lima puluh) sampel percobaan tidak ditemukan kesalahan atau kesalahan sama dengan 0 (nol). Langkah-langkah dalam stop-or-go sampling adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2002):

- a. Menentukan attribute-attribute yang diperiksa
- b. Menentukan Desired Upper Precision Limit (DUPL) dan tingkat keandalan (Confidence Level)

Tingkat keandalan yaitu probabilitas benar dalam mempercayai sistem pengendalian internal sebesar 95%, karena sistem pengendalian yang ada di Kantor Pelayanan PBB sudah baik dan penentuan batas ketetapan atas yang

diinginkan sebesar 5% karena kepercayaan terhadap pengendalian internal cukup besar.

- c. Menggunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian kepatuhan guna menentukan sampel pertama yang harus diambil pada tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian kepatuhan dengan tingkat keandalan 95% dan DUPL 5%. Besarnya sampel minimum adalah 60 (enam puluh).

- d. Membuat tabel stop-or-go decision

Pengambilan sampel dihentikan apabila AUPL lebih kecil atau sama dengan DUPL. Jika dari pemeriksaan AUPL lebih besar dari DUPL maka perlu penambahan jumlah sampel yang diperoleh karena kriteria sampling belum tercapai.

- e. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel, meliputi:

- Menghitung jumlah kesalahan/penyimpangan dalam sampel.
- Menghitung batas kesalahan maksimal dalam sampel.
- Menganalisis penyimpangan yang terjadi.

Analisis dilakukan dengan membandingkan antara AUPL dengan DUPL untuk menilai apakah sistem pengendalian efektif atau tidak. Jika AUPL kurang

dari atau sama dengan DUPL maka sistem pengendalian internal efektif, sebaliknya jika AUPL lebih besar dari DUPL maka sistem pengendalian internal tidak efektif.

Sampling yang digunakan adalah probability sampling, yaitu memberikan kemungkinan yang sama bagi setiap unsur populasi yang dipilih. Probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel random sampling atau sampling acakan sederhana. Yang dimaksud dengan random sampling adalah bahwa setiap unsur dari keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Nasution, 2004).

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I

Pendahuluan

Menguraikan latar belakang , rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisannya

BAB II

Pajak Bumi dan Bangunan dan Sistem Pengendalian Internal

Berisi uraian dan teoritis studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang akan digunakan sebagai landasan

berpikir bagi penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dan permasalahan yang akan diteliti.

BAB III Gambaran Umum Kabupaten Sleman dan Kantor Pelayanan PBB Sleman

Menjelaskan mengenai gambaran umum Kabupaten Sleman dan gambaran umum Kantor Pelayanan PBB Sleman.

BAB IV Analisis data

Berisi tentang hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh serta pembahasannya.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan yang diambil dari penulisan skripsi dan yang akan dijadikan dasar untuk memberikan saran-saran.